

**PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KOMUNITAS  
NELAYAN BAJO BERBASIS EKOLOGI DAN KEARIFAN  
LOKAL DI KAWASAN PESISIR/ PANTAI TELUK BONE  
KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR**

**ASWITA WIRYADISURIA**

**P022191004**



**PROGRAM STUDI  
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**ARRANGEMENT OF THE BAJO ETHNIC FISHERMEN  
COMMUNITY SETTLEMENT AREA BASED ON ECOLOGY  
AND LOCAL WISDOM ON THE COAST OF BONE BAY  
TANETE RIATTANG TIMUR DISTRICTS**

**ASWITA WIRYADISURIA**

**P022191004**



**GRADUATE PROGRAM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR, INDONESIA  
2022**

**PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KOMUNITAS NELAYAN BAJO  
BERBASIS EKOLOGI DAN KEARIFAN LOKAL DI KAWASAN PESISIR/  
PANTAI TELUK BONE KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR**

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Disusun dan diajukan oleh

ASWITA WIRYADISURIA

P022191004

Kepada

**SEKOLAH PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KOMUNITAS NELAYAN BAJO  
BERBASIS EKOLOGI DAN KEARIFAN LOKAL DI KAWASAN PESISIR/  
PANTAI TELUK BONE KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR**

Disusun dan diajukan oleh

**ASWITA WIRYADISURIA**

**P022191004**

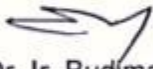
Telah di pertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah  
Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin

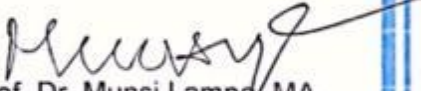
Pada tanggal 12 Agustus 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi Syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

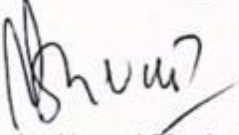
Pembimbing Pendamping


  
Prof. Dr. Ir. Budimawan, DEA  
Nip. 196201241987021002

  
Prof. Dr. Mungsi Lampe, MA  
Nip. 195612271986121001

Ketua Program Studi,  
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Dekan Sekolah Pascasarjana  
Universitas Hasanuddin

  
Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng  
Nip. 196207271989031003

  
Prof. dr. Buda, Ph.D. SP.M(K). M.Med Ed  
Nip. 196612311995031009

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aswita Wiryadisuria

Nomor Mahasiswa : P022191004

Program Studi : Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Jenjang : Magister (S2)

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul **Penataan Kawasan Permukiman Komunitas Nelayan Bajo Berbasis Ekologi Dan Kearifan Lokal Di Kawasan Pesisir/ Pantai Teluk Bone Kecamatan Tanete Riattang Timur** adalah karya tulisan saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 18 Agustus 2022

Yang menyatakan,



**ASWITA WIRYADISURIA**

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Alhamdulillahirobbil alamin* puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya laporan penelitian yang berjudul “*Penataan Kawasan Permukiman Komunitas Nelayan Bajo Berbasis Ekologi Dan Kearifan Lokal Di Kawasan Pesisir/ Pantai Teluk Bone Kecamatan Tanete Riattang Timur*” yang merupakan salah satu syarat untuk penyelesaian studi magister pada Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini juga, dengan penuh rasa syukur dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta **Damis,SKM** dan Ibu tercinta **Hermawati, S.Kep** yang telah memberikan banyak dukungan motivasi, materi, tenaga, pikiran, waktu dan semangat serta do’a kepada penulis selama proses penelitian hingga bisa berada di tahap ini. Serta kepada kakak pertama saya **apt. Ika Indra Wijaya,S.Farm** yang banyak membantu dalam dukungan motivasi dan materi dan kakak kedua saya **Wisnu Pramudia,SE** yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam hal ini instansi terkait yang telah bersedia menjadi informan, memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Tak lupa lupa penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Komunitas Suku Bajo yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis yang tidak dapat disebut satu per satu.

Penulis menyadari bahwa selesainya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Prof. Dr. Ir. Budimawan, DEA** selaku ketua komisi penasihat dan **Prof. Dr. Mungsi Lampe, MA** selaku anggota komisi penasihat yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para dosen penguji yakni **Prof. Dr. Hamka Naping, MA; Dr. Muhammad Banda Selamat, ST., M.Si;** serta **Dr. Andi Adri Arief, S.Pi., M.Si** yang telah memberikan saran dan masukan demi perbaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih penulis juga penulis ucapkan kepada Rektor Universitas Hasanuddin Makassar **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc,** Dekan Sekolah Pascasarjana **Prof. dr. Budu, Ph.D. SP.M(K), M.Med Ed,** Ketua Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah **Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng,** serta para dosen pengampu lainnya. Para staf beserta seluruh jajaran civitas akademik dan mahasiswa perencanaan dan pengembangan wilayah Angkatan 2019 yang telah bersama-sama berjuang selama di perkuliahan dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tesis ini. Namun, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber

inspirasi dan pedoman bagi peneliti selanjutnya untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik, Serta masukan berarti bagi pemerintah Kabupaten Bone dan Daerah lain.

Makassar, 18 Agustus 2022

**ASWITA WIRYADISURIA**



## ABSTRAK

**ASWITA WIRYADISURIA.** Penataan Kawasan Permukiman Komunitas Nelayan Bajo Berbasis Ekologi dan Kearifan Lokal di Pesisir/Pantai Teluk Bone Kecamatan Tanete Riattang Timur (dibimbing oleh **Budimawan** dan **Munsi Lampe**).

Penelitian ini bertujuan untuk Menggambarkan karakteristik permukiman Nelayan Suku Bangsa Bajo yang ada di Pesisir Teluk Bone dan Mengintruksi konsep yang tepat dalam penataan Kawasan permukiman nelayan Suku Bangsa Bajo berbasis ekologi dan kearifan lokal.

Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian non-eksperimental dan bersifat deskriptif-kualitatif. Penelitian ini menggunakan Teknik Sampling Snowball dan menggunakan analisis SWOT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil Analisa dan Pengamatan langsung di lokasi penelitian, dapat di ketahui bahwa terdapat 3 jenis pola permukiman yang ada di Kawasan Permukiman Suku Bangsa Bajo di Pesisir Teluk Bone yaitu 1) pola permukiman memanjang (linear), 2) pola permukiman mengelompok, dan 3) pola permukiman menyebar. Berdasarkan hasil penilaian pengaruh pola permukiman dengan aspek keberlanjutan dapat disimpulkan bahwa konfigurasi ruang yang paling sesuai dengan konsep berkelanjutan untuk penataan Kawasan permukiman Suku Bangsa Bajo yaitu pola permukiman berkelompok yang dapat meminimalisasi kerusakan lingkungan. Selain itu dapat juga dijadikan sebagai tempat untuk usaha dalam meningkatkan ekonomi masyarakat serta dapat mempertahankan nilai-nilai sosial budaya masyarakat pesisir.

**Kata Kunci:** *Pesisir, Permukiman Nelayan, Suku Bajo.*

## ABSTRACT

**ASWITA WIRYADISURIA.** Arrangement of the Bajo Ethnic Fishermen Community Settlement Area Based on Ecology and Local Wisdom on The Coast of Bone Bay Tanete Riattang Timur Districts (Supervised by **Budimawan** and **Munsi Lampe**).

This research aims to describe the characteristics of the settlements of fishermen from the Bajo tribe in the Bone Bay Coast and to instruct the right concept in structuring the settlements of Bajo fishermen based on ecology and local wisdom.

This type of research is a non-experimental research type and is descriptive-qualitative. This study uses the Snowball Sampling Technique and uses a SWOT analysis

The results showed that based on the results of analysis and direct observation at the research location, it can be seen that there are 3 types of settlement patterns in the Bajo Tribe Settlement Area on the Bone Bay Coast, namely 1) longitudinal settlement patterns (linear), 2) clustered settlement patterns, and 3) the settlement pattern is spread out. Based on the results of the assessment of the effect of settlement patterns on sustainability aspects, it can be concluded that the spatial configuration that is most in accordance with the sustainable concept for structuring the Bajo ethnic settlement area is a group settlement pattern that can minimize environmental damage. In addition, it can also be used as a place for efforts to improve the community's economy and can maintain the socio-cultural values of coastal communities.

**Keywords:** *coastal, residential fisherman, Bajo tribe.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN JUDUL BERBAHASA INGGRIS .....	ii
PERNYATAAN PENGAJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
2.1. Kawasan Pesisir .....	11
2.2. Orang Bajo .....	13
2.3. Kearifan Lokal Suku Bajo .....	14
2.4. Karakteristik Permukiman Suku Bajo .....	19
2.5. Permukiman Nelayan .....	22
2.6. Konsep <i>Eco-settlements</i> .....	31
2.7. Penelitian Terdahulu .....	34
BAB III METODE PENELITIAN .....	38
3.1. Tipe dan Jenis Penelitian .....	38

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	39
3.3. Variabel Penelitian.....	40
3.4. Informan Penelitian.....	41
3.5. Metode Pengumpulan Data .....	42
3.6. Teknik Analisis Data .....	47
3.7. Kerangka Pikir Penelitian .....	49
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	50
4.1. Tinjauan Umum Kabupaten Bone.....	50
4.2. Gambaran Umum Kelurahan Bajoe.....	53
4.2.1. Demografi.....	56
4.2.2. Kondisi Penggunaan Lahan .....	57
4.2.3. Prasarana dan Sarana Fasilitas Umum.....	59
4.2.4. Aspek Sosial Budaya Ekonomi dan Aspek Kearifan Lokal .	60
4.2.5. Pendidikan .....	65
4.2.6. Mata Pencaharian .....	66
4.2.7. Persepsi Masyarakat Bajo.....	69
4.3. Rencana Tata Ruang Kabupaten Bone.....	70
4.3.1. Rencana Tata Guna Lahan .....	70
4.3.2. Fungsi dan Peran Kawasan .....	71
4.3.3. Rencan Pola Ruang .....	71
4.3.4. Arahlan Pengembangan Zonasi Kabupaten Bone .....	72
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	76
5.1. Karakteristik Pola Permukiman Komunitas nelayan Bajo .....	76
5.1.1. Pola Permukiman Memanjang (Linear)	80
a. Kondisi prasarana permukiman	80
b. Kondisi sosial ekonomi	85
c. Kelebihan pola permukiman memanjang (linear)	86
d. Kekurangan pola permukiman memanjang (linear)	87
5.1.2. Pola Permukiman Mengelompok	87

a. Kondisi prasarana permukiman	88
b. Kondisi bangunan	93
c. Kondisi Sosial Ekonomi	94
d. Kelebihan pola permukiman mengelompok	95
e. Kekurangan pola permukiman mengelompok	96
5.1.3. Pola Permukiman Menyebar	97
a. Kondisi prasarana permukiman	98
b. Kondisi bangunan	103
c. Kondisi Sosial Ekonomi	104
d. Kelebihan pola permukiman menyebar	105
e. Kekurangan pola permukiman menyebar	105
5.2. Isu Suku Bajo .....	107
5.3. Konsep Penataan Kawasan Permukiman Nelayan Bajo di Pesisir Teluk Bone .....	110
5.3.1. Konsep berdasarkan Pola Permukiman	110
BAB VI PENUTUP .....	132
6.1. KESIMPULAN .....	132
6.2. SARAN.....	133
DAFTAR PUSTAKA.....	135

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel. 1	Matriks Peneitian Terdahulu .....	35
Tabel. 2	Variabel Penelitian .....	40
Tabel. 3	Variabel Penelitian .....	45
Tabel. 4	Luas daerah, jarak dari ibukota menurut Kecamatan di Kabupaten Bone Tahun 2020.....	52
Tabel. 5	Luas Kelurahan Bajoe Tiap Lingkungan Tahun 2016 .....	54
Tabel. 6	Jumlah Penduduk Kelurahan Bajoe Tahun 2016-2020.....	57
Tabel. 7	Penggunaan Lahan Kelurahan Bajoe Tahun 2020 .....	58
Tabel. 8	Jenis Sarana fasilitas umum .....	59
Tabel. 9	Tingkat Pendidikan masyarakat komunitas nelayan Bajo .....	65
Tabel. 10	Jenis Mata Pencaharian dan Pendapatan Masyarakat Suku Bajo .....	68
Tabel. 11	Arahan Pengembangan Zona Kabupaten Bone .....	72
Tabel. 12	Tabel Identifikasi Pola yang Tepat Pada Penataan Kawasan Permukiman Nelayan Komunitas nelayan Bajo.....	110
Tabel. 13	Faktor Internal dan Faktor Eksternal Pengembangan Kawasan Permukiman Neyalayan Komunitas nelayan Bajo dengan Pola Mengelompok.....	112
Tabel. 14	Matriks SWOT Strategi Penataan Kawasan Permukiman Nelayan Komunitas nelayan Bajo di Pesisir Teluk Bone .....	114

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar. 1 Pola Permukiman.....	26
Gambar. 2 Struktur Ruang Permukiman.....	27
Gambar. 3 Pola Tata Ruang Permukiman Pesisir .....	28
Gambar. 4 Peta Lokasi Penelitian.....	39
Gambar. 5 Purposive sampling Masyarakat Komunitas nelayan Bajo.....	42
<i>Gambar. 6 Analisis SWOT</i> .....	48
Gambar. 7 Peta Administrasi Kabupaten Bone 2012-2032 .....	53
Gambar. 8 Peta Administrasi Kelurahan Bajoe 2021 .....	54
Gambar. 9 Peta Luas Kelurahan Bajoe Tiap Lingkungan Tahun 2016 ....	55
Gambar. 10 Lokasi studi objek permukiman Suku Bajo.....	56
Gambar. 11 Peta Penggunaan Lahan Kelurahan Bajoe Tahun 2020 .....	59
Gambar. 12 Sebaran Sarana Permukiman Nelayan Suku Bajo .....	60
Gambar. 13 Mata Pencarian Masyarakat Dominan Nelayan .....	68
Gambar. 14 Peta Struktur Ruang Kabupaten Bone 2012-2032.....	71
Gambar. 15 Peta Pola Ruang Kabupaten Bone 2012-2032 .....	72
Gambar. 16 Ilustrasi Posisi Permukiman Nelayan Komunitas nelayan Bajo .....	76
Gambar. 17 Peta Tata Letak Bangunan Permukiman Suku Bajo .....	78
Gambar. 18 Peta Pola Permukiman Nelayan Suku Bajo .....	79
Gambar. 19 Pola Permukiman Memanjang (Linear).....	80
Gambar. 20 Kondisi Jalan Pada Kawasan Pola Permukiman Memanjang (Linear) .....	81
Gambar. 21 Kondisi Drainase Pada Kawasan Pola Permukiman Memanjang (Linear).....	82
Gambar. 22 Kondisi Air Bersih/Minum Pada Kawasan Pola Permukiman Memanjang.....	83
Gambar. 23 Kondisi Sanitas Pada Kawasan Pola Permukiman Memanjang (Linear).....	84

Gambar. 24 Kondisi Persampahan Pada Kawasan Pola Permukiman Memanjang .....	84
Gambar. 25 Kondisi Bangunan Pada Kawasan Pola Permukiman Memanjang (Linear).....	85
Gambar. 26 Pola Permukiman Mengelompok .....	88
Gambar. 27 Kondisi Jalan Pada Kawasan Pola Permukiman Mengelompok .....	89
Gambar. 28 Kondisi Drainase Pada Kawasan Pola Permukiman Mengelompok .....	90
Gambar. 29 Kondisi Air Minum/Bersih Pada Kawasan Pola Permukiman Mengelompok .....	91
Gambar. 30 Kondisi Sanitasi Pada Kawasan Pola Permukiman Mengelompok .....	92
Gambar. 31 Kondisi Persampahan Pada Kawasan Pola Permukiman Mengelompok .....	93
Gambar. 32 Kondisi Bangunan Pada Kawasan Pola Permukiman Mengelompok .....	94
Gambar. 33 Pola Permukiman Menyebar .....	98
Gambar. 34 Kondisi Jalan Pada Kawasan Pola Permukiman Menyebar.	99
Gambar. 35 Kondisi Drainase Pada Pola Permukiman Menyebar.....	100
Gambar. 36 Kondisi Air Bersih Pada Pola Permukiman Menyebar .....	101
Gambar. 37 Kondisi Sanitasi Pada Pola Permukiman Menyebar .....	102
Gambar. 38 Kondisi Persampahan Pada Pola Permukiman Menyebar.	103
Gambar. 39 Kondisi Bangunan Pada Pola Permukiman Menyebar.....	104
Gambar. 40 Kondisi Sosial Ekonomi Pada Pola Permukiman Menyebar .....	105
Gambar. 41 Ilustrasi Penataan Permukiman Suku Bajo di Desa Labuan .....	123



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kawasan pesisir memiliki peranan strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu fungsi kawasan pesisir adalah sebagai area pemukiman bagi penduduk yang berprofesi sebagai nelayan, pelayar, petambak, petani rumput laut, dan sejenisnya.

Masyarakat pesisir dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari ketergantungannya terhadap sumberdaya pesisir karena mata pencaharian penduduknya yang bergantung pada laut. Mata pencahariannya bersumber dari laut sehingga mereka memilih untuk bertempat tinggal di wilayah pesisir. Potensi dan sumber daya alam di kawasan pesisir yang beraneka ragam menjadi daya tarik masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga terbentuklah permukiman pesisir yang bervariasi sesuai dengan tingkat penghidupan masyarakatnya (Ristianti, 2015).

Budaya bermukim merupakan persoalan manusia mengenai tempat tinggal dan lingkungannya yang telah ada sejak manusia mulai merasa mampu mengorganisasikan diri, berhenti mengembara dalam perburuan, bercocok tanam, menjinakkan dan mengembakbiakkan ternak, serta sedikit menguasai alam sekitarnya (Bahri, 2005).

Pada perkembangan kampung-kampung nelayan yang semakin padat dan kurang tetata akibat dari pertumbuhan penduduk dan

perpindahannya ke kawasan kota dan pinggiran kota, khususnya kota-kota pantai yang masih memberi peluang. Permukiman pesisir yang memiliki permasalahan berupa permukiman yang cenderung berdekatan (kepadatan antar bangunan tinggi dan jarak antar bangunan yang rapat) dan kumuh (tidak teratur, kotor), kondisi lingkungan yang kurang sehat dan kurangnya sarana dan prasarana serta keadaan perekonomian masyarakat yang kurang dapat berkembang (Ristianti, 2015).

Permukiman kumuh nelayan merupakan gambaran kualitas lingkungan tempat tinggal yang rendah. Kualitas yang rendah tersebut tidak hanya pada rumah tinggal nelayan, tetapi juga mengenai lingkungan pesisir sekitarnya. Ekspresi keruangan wilayah pesisir seperti itu adalah sebagai hasil interaksi antara aktivitas manusia dengan lingkungan sekitar (Christiawan & Budiarta, 2017).

Menurut Soerमारwoto (1994) bahwa kualitas lingkungan adalah derajat kemampuan nyata suatu lingkungan untuk memenuhi perumahan yang baik yang dapat digunakan sebagai ruang tinggal bagi penghuninya dan terbentuk atas beberapa unsur, yaitu kondisi rumah sebagai tempat tinggal dan keadaan lingkungan rumah tersebut. Parameter untuk menentukan kualitas lingkungan permukiman sangat bermacam-macam. Kualitas lingkungan permukiman tidak lepas dari kualitas rumah-rumah yang ada di dalamnya, prasarana dasar dan sanitasi lingkungannya. Dari segi sosial ekonomi dapat dilihat dari pendidikan, pendapatan, jumlah anggota keluarga dan sebagainya.

Menurut salim (1979) dengan ketiadaan modal, rendahnya pendidikan, terbatasnya keterampilan, dan rendahnya pendapatan maka kualitas lingkungan permukiman akan rendah. Selain dilatarbelakangi oleh kondisi sosial ekonomi, kualitas lingkungan permukiman juga dipengaruhi oleh fasilitas elementer seperti air minum, tempat mandi dan kakus, listrik, saluran dan pembuangan air tinja dan sampah (Ridwan & Giyarsih, 2012).

Masalah permukiman berkaitan erat dengan proses pembangunan yang menyangkut masalah sosial, ekonomi dan lingkungan sekitarnya. Untuk menjadi kawasan pemukiman, maka kawasan pesisir juga harus memenuhi syarat-syarat sebuah kawasan pemukiman, terutama tersedianya sarana dan fasilitas kesehatan lingkungan yang merupakan salah satu syarat utama dalam sebuah kawasan pemukiman (Febriandi, 2016) dalam (Nurokhman, 2019).

Keberadaan tepi laut atau pesisir pantai merupakan ruang yang relatif dominan bagi permukiman perairan di Indonesia. Dari sekian banyak permukiman perairan di Indonesia, salah satu di antaranya adalah kawasan bermukim komunitas nelayan Bajo (selanjutnya disebut orang Bajo atau "Bajo" saja) yang terletak di Desa Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Proses terbentuknya permukiman komunitas nelayan Bajo di pesisir Teluk Bone sampai saat ini tidak lepas dari kondisi geografis dan lingkungan alam yang dilatarbelakangi dengan kegiatan keseharian warga sebagai nelayan atau pelaut. Perubahan pola pemukiman dari laut, yang menjadikan kelompok-kelompok perahu

sebagai kampungnya, ke darat menyebabkan komunitas nelayan Bajo mengalami perubahan pada beberapa aspek kehidupan. Hal ini terjadi karena secara ekologis, terdapat perbedaan kondisi kehidupan di darat dengan kehidupan di laut yang mutlak disesuaikan.

Sementara dari sisi permukiman terlihat bahwa sebagian besar kondisi rumah tinggal dari komunitas nelayan Bajo berada dalam kategori tidak layak huni yang dicirikan dengan kekumuhan. Kondisi ini terlihat jelas dari halaman yang sangat sempit, sanitasi yang rendah, fasilitas pendukung yang tidak lengkap, tata letak bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tata letak perlengkapan melaut yang tidak teratur.

Kemampuan sumberdaya finansial yang rendah secara langsung akan mengurangi perhatian komunitas nelayan di untuk memperbaiki dan memelihara kualitas permukiman. Hal ini dikarenakan sumberdaya finansial yang berasal dari pendapatan yang rendah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok anggota keluarga. Kondisi ini akan mengakibatkan terjadinya dampak permasalahan permukiman yang dihadapi oleh masyarakat pesisir, khususnya penduduk Bajo, akan menjadi lebih luas dan kompleks. Dampak negatif dari keberadaan permukiman kumuh ini tidak hanya bersifat mikro yang dialami langsung oleh pemukim, tetapi dapat bersifat meso maupun makro yang dirasakan juga oleh Sebagian besar warga masyarakat yang berada di sekitar permukiman kumuh tersebut. Permasalahan permukiman kumuh ini akan

dapat menurunkan kualitas lingkungan pesisir dan pantai, serta lebih jauh pada kerusakan ekosistem laut yang akan berdampak pada pengurangan hasil tangkapan ikan.

Komunitas nelayan Bajo yang ada di wilayah pesisir yang menggantungkan kehidupannya pada ekosistem laut sesuai dengan adat kebiasaannya, sehingga perlu dilakukan pengelolaan lingkungan di wilayah laut dan pantai secara terpadu. Pengelolaan lingkungan secara terpadu berdampak pada pengelolaan efektif untuk menyeimbangkan pemanfaatan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Berdasarkan penyeimbang pemanfaatan tersebut memungkinkan timbulnya bentuk-bentuk pengelolaan lain yang lebih aplikatif (*applicable*) dan adaptif (*acceptable*). Menurut (Dewi, 2018). Salah satu bentuk pengelolaan yang lebih aplikatif dan adaptif dalam pengelolaan adalah pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat (*community based management*).

Pengelolaan lingkungan di wilayah pesisir memang tidak bisa dilepaskan dari kondisi riil komunitas nelayan Bajo itu sendiri. Sehingga strategi yang diperlukan dalam pengelolaan lingkungan di wilayah pesisir adalah pengelolaan berbasis masyarakat. Hal ini sangat kental dipengaruhi oleh potensi, karakteristik dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat. Dengan demikian pengelolaan wilayah pesisir yang dilakukan berbasis masyarakat tentunya berujung pada tercapainya kesejahteraan masyarakat pesisir, terutama mengurangi angka kemiskinan pada masyarakat pesisir. Di sisi lain, peran pemerintah dalam

hal ini adalah wajib memberikan perlindungan dan pemenuhan atas kesejahteraan masyarakat khususnya pemberantasan kemiskinan.

Pada kasus lingkungan komunitas nelayan Bajo ini, selain mempertahankan pola permukiman yang tumbuh dengan organik (tumbuh subur tanpa perencanaan), yang menjadi ciri khas dari perkembangan kawasan desa dan perkembangan fisik kawasan permukiman yang mempertahankan nilai-nilai khas kawasan tradisional (lingkungan), banyak potensi yang perlu dipertimbangkan untuk dimanfaatkan dalam penataan kawasan permukiman tersebut. Pandangan dan pola kebiasaan (budaya) masa lalu yang mengandung nilai-nilai luhur yang pernah ada dan difungsikan oleh komunitas nelayan Bajo menjadi sebuah nilai dan karakter yang harus dipertahankan atau dibangkitkan kembali. Hal itu termasuk juga dalam pola kebiasaan masyarakat yang mendukung berbagai aktivitas/kegiatan. Potensi-potensi yang pernah ada atau masih relative dipertahankan perlu untuk dikembangkan, demikian halnya penataan pemukiman kondusif yang direncanakan juga diharapkan bisa mendukung ke arah peningkatan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan fisik dan sosial kemasyarakatan.

Menurut (Larasati & Satwikasari, 2021), salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam melakukan pembangunan perkotaan adalah perencanaan dan perancangan kawasan permukiman. Perkembangan perkotaan di negara berkembang seperti Indonesia tidak pernah terlepas dari permasalahan yang belum terkendali secara keseluruhan. Dalam

merespon isu permasalahan yang terjadi di Kawasan permukiman nelayan Bajo, diperlukan sebuah gagasan dalam mencapai hubungan timbal balik antara pembangunan kawasan permukiman dengan ekosistem lingkungan alam yang ada di sekitarnya. Salah satu ilmu arsitektur yang dapat menjadi sebuah ide gagasan dalam penerapannya adalah konsep arsitektur ekologi yang merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kawasan permukiman dapat dikatakan sebagai kawasan permukiman ekologi apabila telah menerapkan prinsip-prinsip arsitektur ekologi serta melalui berbagai penilaian yang telah memperhatikan berbagai aspek.

Menurut Frick & Suskiyatno (2017) dalam Wibowo dkk (2018), secara Bahasa ekokultur terdiri dari dua kata yaitu eko dan kultur atau ekologis dan kultur atau budaya. Arsitektur ekologis merupakan wadah fasilitas yang menciptakan hubungan timbal balik antara kebutuhan manusia dengan lingkungannya. Sementara kultur adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia setelah proses belajar (Koentjaraningrat, 1987). Potensi kampung nelayan berupa aspek sosial dapat menjadi modal permukiman berkelanjutan (Dimitra dan Yuliasuti, 2012). Pengelolaan Kawasan pesisir di Indonesia perlu memperhatikan kesesuaian karakteristik dan dinamika ekosistem eksisting (Chalid, 2019).

Konsep ekokultur pada perkampungan nelayan tidak hanya berorientasi kepada nilai ekonomi dan nilai ekologi tetapi juga memperhatikan aktivitas manusia terutama nelayan (Putra dkk, 2016). Ekologi yang dimaksud adalah pembangunan berwawasan lingkungan yang mana memanfaatkan potensi alam semaksimal mungkin, termasuk penghawaan lingkungan. Penanganan lingkungan permukiman nelayan harus bertitik tolak pada karakter spesifik yang berkaitan dengan aktifitas sehari-hari nelayan dengan tidak hanya mengedepankan masalah peningkatan kualitas lingkungan nelayan semata, tetapi juga bagaimana mengenerate kelangsungan hidup mereka (Sela, 2011).

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan tinjauan konsep penataan kawasan permukiman nelayan Bajo berbasis ekologi dan kearifan lokal yang bertujuan untuk meminimalisir dampak yang terjadi akibat pembangunan permukiman yang mempengaruhi kualitas sebuah lingkungan permukiman yang ada di sekitarnya, sehingga dengan adanya penelitian ini maka berbagai permasalahan yang terjadi pada pembangunan kawasan permukiman nelayan Bajo dapat di jaga secara berkelanjutan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang di atas, permasalahan pokok penelitian lapangan ini dalam rangka penulisan tesis dirumuskan dalam dua pertanyaan yang saling berkaitan sebagai berikut:



1. Bagaimana karakteristik permukiman komunitas nelayan Bajo yang berbasis ekologi dan kearifan lokal?
2. Bagaimana konsep penataan kawasan permukiman komunitas nelayan Bajo yang berbasis ekologi dan kearifan lokal?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Menggambarkan karakteristik permukiman nelayan Bajo yang berbasis ekologi dan kearifan lokal.
2. Mengontruksi konsep penataan kawasan permukiman komunitas nelayan Bajo yang berbasis ekologi dan kearifan lokal dan bersesuaian dengan kondisi pemukiman masa kini.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasil kajian ilmiah tentang karakteristik pola permukiman komunitas nelayan Bajo khususnya yang ada di kawasan pesisir/pantai Teluk Bone, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Dari pertimbangan praktis, hasil penelitian yang menyajikan sebuah konstruksi penataan kawasan permukiman komunitas nelayan Bajo berbasis ekologi dan kearifan lokal dapat di rekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk sedikit banyak bisa menjadi bahan acuan pengembangan kawasan permukiman pesisir pantai berbasis ekologi dan kearifan lokal dan yang

bersesuaian dengan kebutuhan perkembangan tata wilayah pemukiman desa-desa pantai pada umumnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kawasan Pesisir**

Penjelasan umum mengenai kawasan pesisir yang meliputi definisi dan karakteristik wilayah merupakan hal yang sangat penting, hal ini bertujuan agar pemahaman mengenai wilayah pesisir dapat dimengerti dan merupakan awal pemahaman dari studi ini. Pengertian tentang pesisir sampai saat ini masih menjadi suatu pembicaraan, terutama penjelasan tentang ruang lingkup wilayah pesisir yang secara batasan wilayah masih belum jelas. *"The band of dry land adjacent ocean space (water dan submerged land) in wich terrestrial processes and land uses directly affect oceanic processes and uses, and vice versa"*. Diartikan bahwa wilayah pesisir adalah wilayah yang merupakan tanda atau batasan wilayah daratan dan wilayah perairan yang mana proses kegiatan atau aktivitas bumi dan penggunaan lahan masih mempengaruhi proses dan fungsi kelautan (Tahir, 2002) dalam (Amintharso, 2015).

Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut dengan batas kearah darat melayani bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti angin laut, pasang surut, perembesan air laut yang dicirikan oleh jenis vegetasi yang khas. Adapun batas wilayah pesisir kearah laut mencakup bagian

atau batas terluar dari daerah kawasan benua dengan ciri-ciri masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar.

Wilayah pesisir mempunyai beberapa karakteristik, yakni : 1) mempunyai tingkat kesuburan tinggi; 2) Kaya akan zat basah, sumber zat organik yang penting dalam rangka makanan di laut; 3) ditandai adanya gradient perubahan sifat ekologi yang tajam; 4) peka terhadap gangguan akibat adanya perubahan lingkungan dengan fluktuasi diluar; dan 5) menjadi zona penyangga (*buffer zone*) bagi kawasan-kawasan migrasi.

Ekosistem wilayah pesisir dan lautan dipandang dari dimensi ekologis memiliki 4 fungsi/peran pokok bagi kehidupan umat manusia yaitu (1) sebagai penyedia sumberdaya alam sebagaimana dinyatakan diatas, (2) penerima limbah, (3) penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan manusia (*life support services*), (4) penyedia jasa-jasa kenyamanan (*amenity services*) (Asyawati & Lely, 2014) dalam (Amintharso, 2015).

Di Indonesia, wilayah pesisir tentu saja banyak dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir dan pulau-pulau yang kebanyakan bermatapencarian sebagai nelayan terutama bagi komunitas nelayan Bajo. Secara professional pemanfaatan wilayah pesisir tersebut terutama untuk penangkapan ikan, perikanan tambak dan permukiman. Itulah sebabnya , untuk menjalani pemanfaatan wilayah pesisir dan segenap potensinya secara berkelanjutan di perlukan konsep penataan kawasan

pesisir termasuk kawasan permukiman yang berbasis ekologi dan kearifan lokal.

## **2.2. Orang Bajo**

Orang Bajo adalah sebuah suku bangsa yang berkeliaran di perairan Asia terutama Indonesia. Mereka pada mulanya tinggal di perairan pesisir pantai yang menjadikan perahu-perahu mereka sebagai rumah tempat tinggal. Sehingga kelompok-kelompok perahu tersebut, bisa makan dengan kampung-kampung atau desa-desa yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat-tempat lain di laut.

Sebutan “Bajo”, “Suku Bajo” atau “Orang Bajo” umumnya digunakan oleh penduduk di Wilayah Indonesia Timur untuk menyebut Suku pengembara laut ini, yang tersebar di berbagai wilayah (Anwar, 2006). Menurut Francois-Robert Zacot (2008). Suku Bajo biasanya membangun permukiman mereka di tepi laut, tetapi masih dalam sisi air, tidak di sisi darat. Karena mereka hidup tersebar di wilayah yang luas, istilah digunakan untuk menunjukkan mereka juga bervariasi tergantung pada lokasi geografis sekitar permukiman.

Komunitas nelayan Bajo yang mendapat sebutan *sea nomads* (pengembara di laut), atau *perahu people* (manusia perahu) karena sejak zaman dahulu mereka adalah petualang laut sejati yang hidup sepenuhnya di atas perahu sederhana. Mereka berlayar berpindah-pindah dari wilayah perairan yang satu dan lainnya. Perahu adalah rumah

sekaligus sarana mereka mencari ikan di luas lautan yang ibaratnya adalah ladang bagi mereka. Ikan-ikan yang mereka tangkap akan dijual kepada penduduk di sekitar pesisir pantai atau pulau. Inilah asal mula mereka disebut sebagai manusia perahu atau sea nomads. Kini mereka banyak bermukim di pulau-pulau sekitar Pulau Sulawesi, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. Persebaran Komunitas nelayan Bajo di beberapa daerah di Nusantara tentunya terjadi karena cara hidup mereka yang berpindah-pindah dan berlayar dengan perahu (Poedjowibowo, Waani, & Warouw, 2016).

Suku bangsa laut apapun di bumi Nusantara ini kerap disamaratakan sebagai suku Bajo. Meski saat ini banyak yang tinggal di darat tetapi ketergantungan suku ini terhadap laut belumlah hilang. Anak-anak mereka berteman dan bermain dengan laut, mereka hidup dan dihidupi dengan lingkungan laut. Hingga sekarang kebanyakan orang Bajo masih bermukim di banyak wilayah pesisir yang tersebar diseluruh Nusantara. Di mana ada tanjung, selat, dan pulau-pulau terutama pulau-pulau karang disitulah Komunitas nelayan Bajo membangun kehidupan.

### **2.3. Kearifan Lokal Suku Bajo**

Kearifan lokal merupakan warisan nenek moyang kita dalam tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk religi, budaya dan adat istiadat. Dalam perkembangannya, masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan mengembangkan suatu kearifan yang

berwujud pengetahuan atau ide, peralatan, dipadu dengan norma adat, nilai budaya, aktivitas mengelola lingkungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Konsep kearifan lokal berakar pada pengetahuan dan pengelolaan atau tradisional. Kearifan adalah kumpulan pengetahuan dan cara berfikir serta praktik bijak yang berakar dalam kebudayaan suatu kelompok manusia yang merupakan hasil pengamatan tanggapan selama kurun waktu yang lama

Kearifan lokal dan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh suatu masyarakat diperoleh melalui proses yang Panjang. Keberadaannya merupakan hasil adaptasi melalui proses belajar terhadap kondisi dan perubahan lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial (Hasrawaty, Anas, & Wisudo, 2017).

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 memberikan pengertian tentang kearifan, yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Bentuk-bentuk kearifan yang ada dalam masyarakat termasuk masyarakat maritim dapat berupa nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Bentuk yang bermacam-macam ini memungkinkan fungsi kearifan menjadi bermacam-macam pula. Berbagai fungsi tersebut antara lain 1) untuk konservasi dan pelestarian sumberdaya alam; 2) untuk pengembangan sumber daya manusia; 3) berfungsi ntuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan; 4) sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan; 5) bermakna

misalnya upacara integrasi komunal atau kerabat; 6) bermakna, misalnya pada upacara daur pertanian; 7) bermakna etika dan moral; 8) bermakna politik, kearifan yang terkait dengan kebudayaan, memiliki arti penting untuk menjaga keberlanjutan kebudayaan, sekaligus agar selalu terjaga kelestariannya (Hasrawaty, Anas, & Wisudo, 2017).

Pengertian kebahasaan kearifan, berarti kearifan setempat (*local wisdom*) yang dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai yang tertanam dan diikuti oleh warga masyarakatnya. Dalam konsep antropologi, kearifan dikenal pula sebagai pengetahuan setempat (*indigenous or local knowledge*), atau kecerdasan setempat (*local genius*), yang menjadi dasar identitas kebudayaan (*cultural identity*). Sementara pengertian kearifan (*tradisional*) adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Dijelaskan pula bahwa kearifan lokal/tradisional bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara penghuni komunitas ekologis ini harus dibangun (Hasrawaty, Anas, & Wisudo, 2017).

Pengertian di atas memberikan cara pandang bahwa manusia sebagai makhluk integral dan merupakan satu kesatuan dari alam



semesta serta perilaku penuh tanggung jawab, penuh sikap hormat dan peduli terhadap kelangsungan semua kehidupan di alam semesta serta mengubah cara pandang *antroposentrisme* ke cara pandang *biosentrisme* dan *ekosentrisme*. Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam suatu sistem sosial masyarakat, dapat dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya yang sekaligus membentuk dan menuntun pola perilaku manusia sehari-hari, baik terhadap alam maupun terhadap alam. Tradisi yang diwarisi turun temurun, kebiasaan atau perilaku ini tumbuh dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan berkembang sesuai kedekatan manusia dengan alam di sekitarnya dan tantangan yang dihadapinya. Ini merupakan kearifan lokal yang mewarnai kehidupan masyarakat. Kearifan lokal dipandang sebagai tindakan dan sikap manusia terhadap sesuatu objek atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Substansi kearifan lokal adalah berlakunya nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh suatu masyarakat dan mewarnai perilaku hidup masyarakat tersebut (Hasrawaty, Anas, & Wisudo, 2017).

Karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris karena perbedaan sumberdaya yang mereka hadapi atau miliki. Melihat dari perspektif antropologis, masyarakat pesisir nelayan berbeda dari masyarakat lain, seperti masyarakat petani, perkotaan atau masyarakat di dataran tinggi. Perspektif antropologis ini didasarkan pada realitas bahwa masyarakat nelayan memiliki pola-pola

kebudayaan yang berbeda dari masyarakat lain sebagai hasil dari interaksi mereka dengan lingkungan beserta sumberdaya yang ada di dalamnya. Pola-pola kebudayaan itu menjadi kerangka berpikir atau referensi perilaku masyarakat nelayan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tindakan nyata, sikap dan perilaku manusia terhadap lingkungan yang mengandung nilai-nilai pelestarian ekosistem adalah bagian dari kecerdasan ekologis suatu masyarakat, misalnya yang berlaku bagi masyarakat pesisir dan ternyata cukup efektif dalam mengelola sumber daya alam, serta upaya pelestarian ekosistem laut dari aktifitas yang bersifat destruktif dan merusak.

Menurut (Sartini, 2009) dalam (Hasrawaty, Anas, & Wisudo, 2017) menjelaskan bahwa kearifan lokal merupakan gagasan masyarakat setempat yang bernilai baik, berupaka pandangan hidup, tata nilai, adat istiadat norma, biasanya bersimbolisasi mitos dan ritual. Corak tradisi dan budaya melaut Komunitas nelayan Bajo yang berkaitan dengan laut dan fungsi laut sebagai tempat kehidupan, menggambarkan bahwa tata nilai, adat istiadat ataupun norma yang ada di dalamnya merupakan upaya bagi Komunitas nelayan Bajo dalam melindungi suatu Kawasan. Komunitas Komunitas nelayan Bajo memiliki kearifan berupa tradisi, aturan atau pantangan turun temurun yang dipraktikkan, dipelihara dan ditaati masyarakat Bajo dalam menjaga dan memanfaatkan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Kearifan tersebut mengandung nilai pelestarian ekosistem perairan laut dan pesisir. Keunikan suku Bajo. seperangkat

kearifan dalam pengelolaan pesisir dan laut karena kaitannya yang sangat erat yang menjadikan laut sebagai tempat keramat dan dimiliki nenek moyang mereka dengan suku lain seperti Bugis-Makassar yang mampu menyelenggarakan kehidupannya di semua tempat. Dengan kearifan, masyarakat Komunitas nelayan Bajo menjaga kelestarian ekosistem dan SDA pesisir dan laut sebagai sumber kehidupan.

Masyarakat Bajo, khusus generasi tua, masih mempercayai gugusan karang tertentu sebagai tempat bersemayam arwah para leluhur. Orang tua melarang anggota keluarga menangkap ikan dan biota lain di sekitar gugusan karang, kecuali terlebih dahulu melakukan ritual tertentu dengan menyiapkan sajian bagi leluhur. Segala pantangan yang mencemari laut dihampar sebagai ritual yang itu kemudian rutin dilakukan dalam masyarakat Bajo. Banyak dari generasi mereka menjadikan ritual itu sebagai media menggumuli laut, mengintiminya, menunjukkan kecintaannya. (Hasrawaty, Anas, & Wisudo, 2017).

Laut adalah sumber kehidupan. Laut adalah tempat tinggal, laut sebagai jalan, laut sebagai teman, laut sebagai obat, laut sebagai tempat bersemayam leluhur Bajo “mbah di laut”.

#### **2.4. Karakteristik Permukiman Suku Bajo**

Komunitas nelayan Bajo pada awalnya tinggal di atas perahu yang disebut *bido'*, hidup berpindah-pindah bergerak secara berkelompok menuju tempat yang berbeda menurut pilihan lokasi penangkapan ikan. Di

atas perahu mereka menjalani hidupnya sejak lahir, berkeluarga hingga akhir hayatnya. Oleh sebab itu, Komunitas nelayan Bajosering disebut *sea nomads* (Sopher, 1971) atau *sea gypsies* (Brown, 1993). Dalam perkembangannya, sebagian besar dari mereka telah tinggal menetap di pinggir laut. Seperti halnya di daerah-daerah lain di Indonesia, mereka hidup menetap di laut atau di pinggir laut. Laut dijadikan sebagai sumber kehidupan (*panamamie ma di lao*). Mereka memiliki prinsip bahwa *pinde kulitang kadare, bone pinde sama kadare* yang berarti memindahkan Komunitas nelayan Bajoke darat, sama halnya memindahkan penyu ke darat Suyuti H. Nasruddin, 2011 dalam (Poedjowibowo, Waani, dan Warouw 2004).

Pola pemukiman menetap dengan rumah panggung, meskipun penuh dengan kebersahajaan merupakan loncatan drastis dari pola nomaden dan menjadikan perahu *vinta* dan *bido'* sebagai rumah dan desanya. Adopsi dan keterlibatan dalam kelompok Ponggawa Sawi model Bugis-Makassar dengan organisasi produktif dan rapi adalah langkah menanjak dari kesatuan keluarga inti sebagai unit-unit produksi. Spesifikasi tangkapan (teripang, sirip hiu, kerang, lobster, ikan kerapu) sebagai komoditas pasar yang mahal dengan spesifikasi sarana tangkap yang melibatkannya dalam jaringan pasar ekspor merupakan puncak dari proses evolusi budaya mencolok dari produksi subsisten. Praktik budidaya laut (teripang, kerang mutiara, lobster, kerapu, rumput laut) merupakan

suatu loncatan evolusi dari berburu ikan liar dan meramu biota tidak liar di laut (Lampe, 2011) dalam (Poedjowibowo, Waani, dan Warouw 2004).

Rumah Komunitas nelayan Bajo memiliki ciri khas tersendiri, karena dibangun di atas perairan, sederhana dan mampu beradaptasi di lingkungan yang ekstrem, merupakan karakteristik yang melekat pada suku Suku Bajo. Ombak, arus laut, dan angin, menjadi denyut kehidupan mereka sehari-hari.. Hampir 90 persen permukiman Komunitas nelayan Bajodibangun di atas laut, sisanya dibangun di atas pulau-pulau karang. Hal inilah yang membedakannya dengan suku-suku lain di Indonesia.

Bagi Suku Bajo, laut menjadi andalan satu-satunya. Mulai dari tempat tinggal sampai mencari kehidupan dilakukan di laut. Setiap rumah akan terhubung dengan jembatan kayu sebagai lalu lintas pejalan kaki. Sampan warga hilir mudik di sela-sela permukiman melalui kanal. Setiap rumah dilengkapi dua-tiga sampan atau perahu. Aktivitas melaut mereka lakukan 24 jam non-stop. Komunitas nelayan Bajo juga dikenal sebagai pelaut ulung. Mereka sudah terbiasa berkelana jauh selama berbulan-bulan. Warganya lebih memilih membangun rumah di laut karena pertimbangan tradisi dan banyak ritual hidup harus dilakukan di laut. Sesuai tradisi, setiap bayi Bajo, dicelupkan ke laut. Tujuannya adalah untuk mengakrabkan mereka dengan laut yang dianggap sebagai saudara.

Meski kini sudah banyak diantara mereka hidup menetap di rumah-rumah sederhana tetapi tetap tidak terpisahkan dari laut. Kemungkinan

besar karena alasan inilah mereka membangun rumah di tepian pantai atau di atas permukaan laut yang dangkal. Tampak pancang-pancang terbuat dari kayu menjadi semacam pondasi yang memisahkan dan menjaga rumah-rumah mereka dari terjangan air laut saat pasang. Beratapkan rumbia, berdinding kayu dengan luas yang tidak seberapa, rumah-rumah tersebut biasanya dihuni satu keluarga bahkan lebih. Nampak pula perahu-perahu kayu sederhana terparkir di sekitaran pelataran rumah yang halamannya adalah air laut (Poedjowibowo, Waani, dan Warouw 2004).

## **2.5. Permukiman Nelayan**

### **2.5.1. Pengertian**

Keberadaan lingkungan permukiman nelayan sangat berkaitan erat dengan sumber penangkapan ikan, daerah distribusi hasil tangkapan dan daerah pantai, dimana pantai harus mudah dicapai oleh publik dengan sistem transportasi dan jaringan jalan yang baik, diperkaya dengan berbagai kegiatan sosial, ekonomi dan budaya yang mempesona tanpa harus merusak keserasian lingkungan (Budiharjo, 1992) dalam (Ramdani & Haryanto, 2013).

Menurut Suprijanto (2000:16) dalam (Ramdani & Haryanto, 2013) karakteristik ekonomi, sosial, dan budaya dari kota tepi pantai, tempat berkembangnya permukiman nelayan adalah sebagai berikut :

1. Memiliki keunggulan lokasi yang dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi;

2. Penduduk mempunyai kegiatan sosial-ekonomi yang berorientasi ke air dan darat;
3. Rata-rata penduduk golongan ekonomi lemah, dengan latar belakang pendidikan relatif terbatas;
4. Pengetahuan akan lingkungan sehat cenderung masih kurang, terjadi kebiasaan “tidak sadar lingkungan” serta cenderung kurang memperhatikan budaya dan risiko;
5. Terdapat peninggalan sejarah/budaya;
6. Terdapat masyarakat yang secara tradisi terbiasa hidup (bahkan tidak dapat dipisahkan) diatas air. terdapat pula budaya/tradisi pemanfaatan perairan sebagai sarana transportasi utama.
7. Merupakan kawasan terbuka (akses langsung), sehingga rawan terhadap keamanan, seperti penyelundupan, penyusupan (masalah pertahanan dan keamanan) dan lain sebagainya.

#### **2.5.2. Pola Permukiman Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau**

Menurut Kostof (1983) Pola permukiman berdasarkan sifat komunitasnya yaitu : (a) Sub Kelompok Komunitas yaitu pola permukiman tipe ini berbentuk cluster, terdiri dari beberapa unit atau kelompok unit hunian, memusat pada ruang-ruang penting, seperti penjemuran, ruang terbuka umum, masjid dan sebagainya dan (b) Face to face yaitu pola permukiman tipe ini berbentuk linier, antara unit-unit hunian sepanjang permukiman dan secara linier terdapat perletakan pusat aktivitas yaitu

tambatan perahu atau dermaga, ruang penjemuran, pasar dan sebagainya.

Pola adalah gambar yang dipakai untuk contoh, corak, sistem, bentuk yang tetap, kombinasi sifat kecenderungan yang khas, informasi bentuk pengorganisasian, Teknik penyusunan, pedoman, kerangka, cara dan usaha. Menurut (Rapoport, 1989) dalam (Putro & Nurhamsyah, 2014) menyebutkan bahwa pola adalah alat untuk mengenali suatu fenomena. Pola permukiman merupakan segala sesuatu yang berfungsi sebagai pedoman untuk menjelaskan dalam menggambarkan suatu kondisi permukiman dengan menggunakan unsur-unsur permukiman itu sendiri. Klasifikasi pola permukiman secara garis besar dapat dikenali melalui 4 (empat) klasifikasi yaitu :

1. Batas (*boundaries*) merupakan batas daerah kekuasaan suatu wilayah atau sebuah permukiman yang dibuat oleh masyarakat setempat, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik.
2. Jenis fasilitas (*massa*), yaitu pengelompokkan elemen fisik dalam suatu permukiman yang merupakan tempat melakukan aktivitas sekaligus sebagai fasilitas bagi penghuni dan penggunanya. Fasilitas permukiman ini dapat berbentuk fasilitas umum (*fasum*) dan fasilitas sosial (*fasos*).
3. Tata ruang (*zona*) merupakan pembagian daerah kegiatan penghuni dalam suatu permukiman, yang diatur berdasarkan



struktur keyakinan, aturan-aturan adat atau kebiasaan masyarakat setempat.

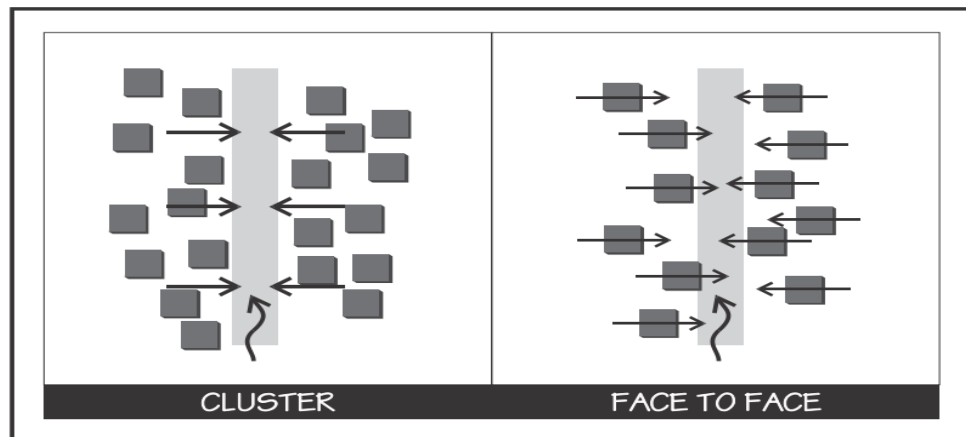
4. Ragam hias, yaitu unsur-unsur dominan yang banyak ditemukan pada permukiman, baik alami maupun buatan manusia (*craftmanship*). Ragam hias juga ada yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat adat setempat, ada juga yang tidak.

Menurut (Abdullah, 2000) dalam (Putro & Nurhamsyah, 2014) membedakan pola permukiman secara garis besar menjadi 2 tipe yaitu :

1. Mengumpul (*compact settlement*), pola ini dapat berbentuk radial, linear, dan papan catur;
2. Menyebarkan (*scattered, dispersed*), pola ini dapat berbentuk multi pusat dan tersebar murni.

Menurut (Taylor, 1980) dalam (Putro & Nurhamsyah, 2014), pola permukiman terdiri dari :

1. Sub kelompok komunitas (*cluster*) yaitu pola permukiman tipe ini berbentuk cluster, terdiri dari beberapa unit atau kelompok unit hunian, memusat pada ruang-ruang penting.
2. *Face to face* yaitu pola permukiman tipe ini berbentuk linear, antara unit-unit hunian sepanjang permukiman dan secara linear terdapat perletakan pusat.



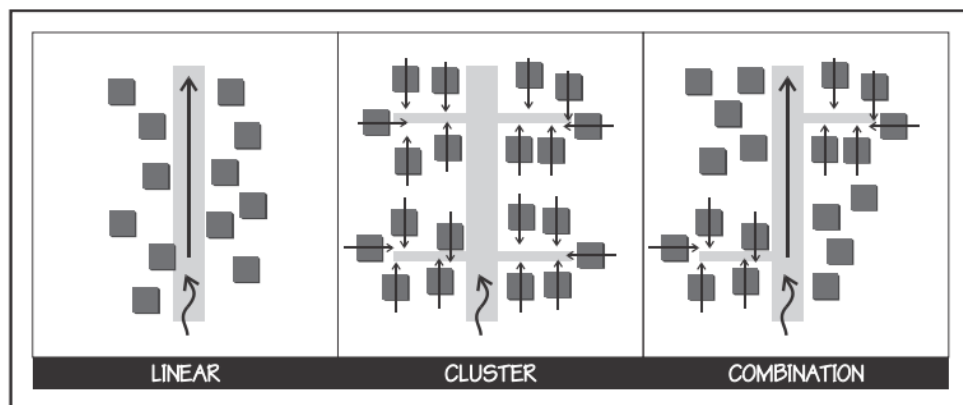
**Gambar. 1** Pola Permukiman

Sumber : (Taylor, 1980) dalam (Putro & Nurhamsyah, 2014)

Menurut (Taylor, 1980) dalam (Putro & Nurhamsyah, 2014), Struktur Ruang Permukiman dikelompokkan menjadi :

1. Linear, yaitu suatu pola sederhana dengan peletakan unit-unit permukiman (rumah, fasum, fasos dan sebagainya) secara terus menerus pada tepi sungai dan jalan. Pada pola ini kepadatan tinggi dan cenderung ekspansi permukiman dan *mixed use function* penggunaan lahan beragam.
2. Cluster, pola ini berkembang dengan adanya kebutuhan lahan dan penyebaran unit-unit permukiman telah mulai timbul. Kecenderungan pola ini mengarah pada pengelompokan unit permukiman terhadap suatu yang dianggap memiliki nilai "penting" atau pengikat kelompok seperti ruang terbuka komunal dalam melakukan aktivitas bersama.
3. Kombinasi, yaitu kombinasi antara kedua pola diatas menunjukkan bahwa selain ada pertumbuhan juga menggambarkan adanya

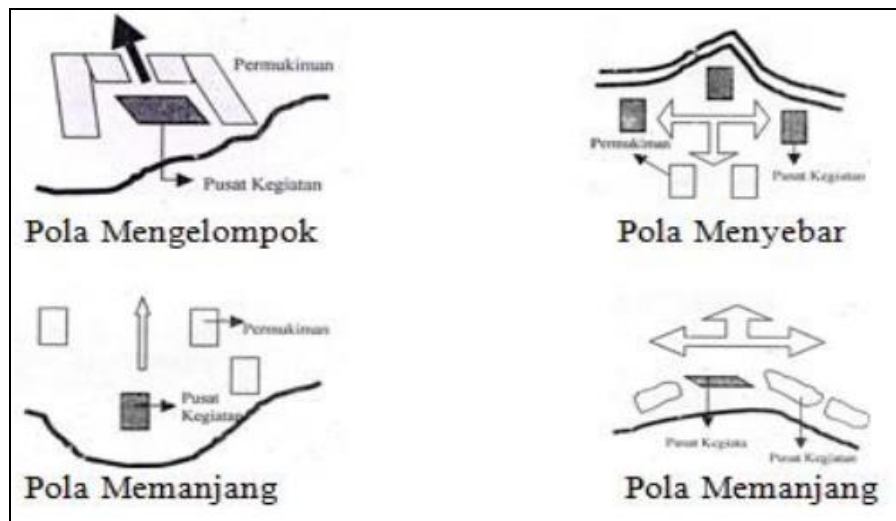
ekspansi ruang untuk kepentingan lain (pengembangan usaha dan sebagainya). Pola ini menunjukkan adanya gradasi dari intensitas lahan dan hirarki ruang mikro secara umum.



**Gambar. 2** Struktur Ruang Permukiman

Sumber : (Taylor, 1980) dalam (Putro & Nurhamsyah, 2014)

Disisi lain, ketergantungan masyarakat pada perairan merupakan aspek yang mempengaruhi pola permukiman pesisir. Hal ini menggambarkan bahwa ketergantungan masyarakat pada perairan akan mempengaruhi pola permukiman tepi air. Pola spasial permukiman pantai memiliki bentuk yang berbeda sesuai dengan karakteristik ekologi dan proses pertumbuhan. Pola spasial permukiman peisisir umumnya membentuk pola memanjang, pola berkelompok dan pola menyebar. (Kosfot, 1991 dan Darjosanjoto, 2007) dalam (Syarif, et al., 2018) Sketsa pola spasial permukiman pesisir dijelaskan pada gambar berikut.



**Gambar. 3** Pola Tata Ruang Permukiman Pesisir

Sumber : (Kosfot, 1991 dan Darjosanjoto, 2007) dalam (Syarif, et al., 2018)

### 2.5.3. Penataan Kawasan Permukiman Nelayan

Sarana Permukiman Nelayan dikutip dari Syahriarto 2013, yaitu:

#### 2.5.3.1 Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Tempat pelelangan ikan (TPI) adalah tempat jual beli ikan dengan sistem lelang dimana terdapat kegiatan menimbang, menempatkan pada keranjang-keranjang dengan jenis-jenisnya atau digelar di lantai siap untuk dilelang, kemudian pelelangan lalu pengepakan es untuk keranjang/peti ikan yang sudah beku. Lokasi TPI sebaiknya dekat dengan dermaga sehingga memudahkan pengangkutannya dari kapal-kapal. Kegiatan ini banyak menggunakan air, oleh karena itu sebaiknya dekat dengan air bersih kondisi saluran drainase di lokasi TPI harus baik agar air tidak tergenang sehingga tidak menimbulkan bau yang menyengat.

#### 2.5.3.2 Tambatan perahu

Tempat penambatan perahu adalah tempat perahu-perahu bersandar/ parkir sesudah dan sebelum bongkar muat ikan. Biasanya berdekatan dengan TPI. Fungsi tambatan perahu sebagai untuk mengikat perahu saat bertabuh dan tempat penghubung antara dua tempat yang dipisahkan oleh laut, sungai maupun danau. terdapat dua tipe tambatan perahu terdiri dari:

- Tambatan tepi, dipergunakan apabila dasar tepi sungai atau pantai cukup dalam, dibangun searah tepi sungai atau pantai.
- Tambatan dermaga, digunakan apabila dasar sungai atau pantai cukup landai, dibangun menjalar ketengah.

#### 2.5.3.3 Tempat penjemuran ikan

Adapun syarat-syarat tempat penjemuran ikan sebagai berikut:

- Tempat penjemuran ikan sebaiknya berupa lapangan terbuka atau terkena sinar matahari.
- Wadah penjemuran ikan sebaiknya berlubang agar air dapat turun supaya cepat kering dan tidak berkarat
- Tempat penjemuran ikan diusahakan bersih dengan membuat salauran pembuangan.
- Sebaiknya ada jaringan drainase supaya tidak ada air yang tergenang sehingga tidak menimbulkan bau.
- Lokasi penjemuran ikan sebaiknya mudah diawasi.

Prasarana dikutip dari Patandianan dan Toban, meliputi:

- a) Dermaga
- b) Jaringan listrik harus dapat menjangkau seluruh areal permukiman
- c) Jaringan jalan
- d) Jaringan air bersih
- e) Darainase
- f) Persampahan

Menurut Masrul (2008) dalam (Ramdani dan Haryanto 2013), menyebutkan bahwa pusat penelitian dan pengembangan kawasan permukiman nelayan dengan kriteria pokok pengembangan sebagai berikut:

- a. Perlu keselarasan pembangunan untuk kepentingan pribadi dan umum;
- b. Perlu memperhatikan tata air, budaya lokal, serta kepentingan umum;
- c. Pengembangan kawasan permukiman dapat dibedakan atas kawasan permukiman penduduk asli dan kawasan permukiman penduduk baru;
- d. Pada permukiman atau perumahan nelayan harus dilakukan upaya penataan dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kawasan;
- e. Program pemanfaatan kawasan yang dapat diterapkan untuk kawasan permukiman penduduk asli(lama) antara lain melalui revitalisasi bangunan, penyediaan utilitas, penanganan sarana air

bersih, air limbah dan persampahan, penyediaan dermaga perahu, serta pemeliharaan rainase;

- f. Program pemanfaatan kawasan yang dapat diterapkan untuk kawasan permukiman baru antara lain melalui penataan bangunan dengan memberikan ruang untuk public access ke badan air, pengaturan pengambilan air tanah, reklamasi, pengaturan batas sempadan dari badan air, dan program penghijauan sempadan.

## **2.6. Konsep *Eco-settlements***

*Eco-settlements* terdiri dari dua kata yaitu *eco* dan *settlements* yang berarti tempat bermukim/tempat tinggal yang ekologis. Arsitektur ekologi dapat didefinisikan sebagai keselarasan antara bangunan dengan lingkungan di sekitarnya dan biasa disebut dengan arsitektur yang berwawasan lingkungan. Selain itu arsitektur ekologi khususnya pada perencanaan dan perancangan kawasan permukiman dapat dikaitkan juga dengan konsep *eco-settlements*. *Eco-Settlements* merupakan salah satu konsep penataan permukiman dengan menyeimbangkan aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek ekologi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan ekosistem dan didukung oleh sistem kelembagaan yang kapabel. Aspek arsitektur ekologi akan menentukan pembangunan kawasan yang dapat mempertimbangkan sisi positif sehingga tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan ekosistem. Dalam melakukan tinjauan konsep

arsitektur ekologi pada kawasan permukiman didasarkan kepada aspek-aspek arsitektur ekologi atau eco-settlements menurut Permen PU No. 2 Tahun 2016. Aspek-aspek tersebut terdiri dari:

### **2.6.1. Aspek Ekologi**

Aspek ekologi yang pertama adalah rumah sehat/bangunan sehat. Persyaratan rumah sehat dan sederhana yaitu luas lantai/jiwa, jenis lantai bangunan, jenis atap dan dinding bangunan, MCK (Mandi, Cuci, Kakus). Kemudian terdapat aspek kepadatan bangunan. Kepadatan bangunan berdasarkan standar Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Daerah Penyangga Kota Metropolitan: tinggi > 100 unit/Ha, sedang > 60-100 unit/Ha, dan rendah > 60 unit/Ha. Berdasarkan kondisi jalan lingkungan. Sebagian lokasi permukiman terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis. Selanjutnya kondisi drainase lingkungan. Ketersediaan saluran drainase permukiman baik tersier maupun lokal. Selain itu tersedianya air bersih (terpenuhi kebutuhan air bersih). Kebutuhan pemenuhan air bersih minimal 60 liter/jiwa/hari. Pengelolaan Persampahan yang sesuai dengan Persyaratan teknik pengelolaan persampahan permukiman yaitu tempat pemilahan sampah skala domestik/rumah tangga, TPS (Tempat Pembuangan Sementara) atau TPS 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) skala lingkungan, area gerobak sampah/truk sampah skala lingkungan, dan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) skala lingkungan. Sistem Proteksi Kebakaran. Persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri



Pekerjaan Umum No. 26 Tahun 2008 [10] yaitu hydrant lingkungan, jalan lingkungan dengan lebar 4 m bebas hambatan, jalur pemadam kebakaran, sarana komunikasi dan sambungan instalasi fire hydrant (siamese fire department connection). Selanjutnya yang terakhir adalah ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH). Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan jumlah penduduk tipe kelurahan sebesar 0,3 m<sup>2</sup> /kapita.

### **2.6.2. Aspek Sosial**

Salah satu aspek sosial yang berperan serta dalam pengembangan kawasan permukiman adalah partisipasi masyarakat di dalam permukiman itu sendiri. Ekologi pada lingkungan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan memiliki peran penting dalam pembentukan karakter pada suatu kawasan permukiman. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi salah satu strategi penting dalam pembangunan permukiman sebagai salah satu faktor dalam mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan yang akan dikembangkan.

### **2.6.3. Aspek Ekonomi**

Pengembangan wilayah khususnya pada kawasan permukiman dipengaruhi oleh proses perencanaan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga mendorong pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu, *Local Economy Development* (LED) dianggap sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian permasalahan pengembangan kawasan permukiman. Sandercock (2003) dalam Sumantyo menjelaskan

bahwa *Local Economy Development* (LED) merupakan perencanaan yang berbasis kepada komunitas dengan tujuan pemberdayaan dan mengurangi campur tangan negara sehingga perencanaan berfokus pada kepentingan masyarakat dan komunitas lokal. Kepemilikan usaha mikro di kawasan permukiman dengan pengembangan inovasi yang dapat mengembangkan perekonomian.

#### **2.6.4. Aspek Kelembagaan**

Program pemerintah dalam pengembangan kawasan permukiman merupakan salah satu kriteria dalam aspek pembangunan permukiman. Dalam hal institusi UU Permukiman telah mengatur tugas serta wewenang Lembaga pemerintahan dalam melaksanakan pengaturan permukiman yang sesuai dengan peraturan pemerintahan. Lembaga bertugas melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan permukiman yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan.

#### **2.7. Penelitian Terdahulu**

Secara umum , penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Namum, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun matriks penelitian terdahulu dalama penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 1 Matriks Peneitian Terdahulu

No.	Penelitian	Tujuan	Variabel/Metode	Hasil
1.	(Ramdani & Haryanto, 2013)  Preferensi Masyarakat Terhadap Penataan Kawasan Permukiman Nelayan Kumuh di Desa Kurau, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah.	Untuk mengetahui bagaimana preferensi masyarakat untuk tetap tinggal atau pindah terhadap penataan Kawasan permukiman nelayan kumuh di Desa Kurau, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah.	1. variabel - tanggapan masyarakat terhadap penataan Kawasan - kemudahan dalam melakukan aksesibilitas - kenyamanan - penyediaan sarana dan prasarana publik  2. metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang berasal dari kuesioner, wawancara dan deskriptif melalui kebijakan pemerintah.	Hasil penelitian yaitu masyarakat memilih untuk tetap tinggal atau dilaksanakan konsolidasi lahan dalam rangka penataan Kawasan permukiman nelayan kumuh di Desa Kurau. Preferensi masyarakat ini dipertimbangkan dari beberapa hal diantaranya aksesibilitas, kenyamanan serta kondisi sarana dan prasarana.
2.	(Santi, Amri, & Haryudin, 2017)  Pola Pemanfaatan Ruang Permukiman Masyarakat Bajo Di Desa Lemo Bajo Kabupaten Konawe Utara Sebagai Arahan Penataan Kawasan Permukiman Pesisir.	Untuk Melihat kecenderungan pemanfaatan ruang permukiman di Desa Lemo Bajo untuk mengetahui pola pemanfaatan ruang sebagai arahan penataan Kawasan permukiman pesisir.	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan metode analisis normative, metode deskripsi kuantitatif dan kualitatif serta metode analisis keruangan (spasial).	Wilayah permukiman masyarakat di Desa Lemo Bajo di Kecamatan Lasolo secara umum mengikuti pola memanjang/pola linear sepanjang pesisir pantai dengan pemanfaatan ruang sebagai fungsi permukiman menggunakan 2,44% (37,75 ha) dari luas wilayah Desa Lemo Bajo. Pemanfaatan ruang di area permukiman selain untuk bangunan tempat tinggal, lahan lainnya digunakan sebagai tempat menjemur hasil

No.	Penelitian	Tujuan	Variabel/Metode	Hasil
3.	(Ruli & Fadjarani, 2014)  Kecerdasan Ekologis Dalam Kearifan Lokal Masyarakat Bajo Desa Torosiaje Provinsi Gorontalo.	Mendeskripsikan sejumlah tradisi, aturan dan pengetahuan praktis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir yang memiliki nilai-nilai kecerdasan ekologis masyarakat Bajo.	Metode penelitian ini adalah survey-deskriptif, dengan sasaran masyarakat suku Bajo di Desa Torosiaje Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo.	laut.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan ekologis masyarakat Bajo tampak dalam tradisi melaut <i>mamia kadio</i> , pengelolaan permukiman, perilaku dalam memperoleh hasil tangkapan dan pengetahuan masyarakat tentang gejala alam laut dan pesisir. Diharapkan nilai-nilai ini dapat direkonstruksi dan disosialisasikan sehingga menjadi identitas masyarakat pesisir lainnya.
4.	(Amintharso, 2015)  Penataan Permukiman Kumuh di Kawasan Pesisir Berbasis Masyarakat.	Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan lingkungan permukiman yang teratur aman dan sehat dengan perubahan perilaku masyarakat.	1. variabel <ul style="list-style-type: none"> <li>- kondisi lokasi</li> <li>- kondisi kependudukan</li> <li>- kondisi bangunan</li> <li>- kondisi sarana dan prasarana dasar</li> <li>- kondisi sosial ekonomi</li> <li>- tingkat partisipasi masyarakat</li> <li>- tingkat kesadaran masyarakat akan kebersihan</li> <li>- tingkat kenyamanan masyarakat pada kondisi lingkungan</li> <li>- kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.</li> </ul> 2. metode penelitian yang digunakan adalah metode Analisa	Hasil dari Analisa yang dilakukan adalah karakter permukiman, bentuk partisipasi dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan, dan kebutuhan perbaikan lingkungan. Hasil akhir dari penelitian ini adalah berupa rumusan konsep perencanaan infrastruktur berbasis masyarakat.

No.	Penelitian	Tujuan	Variabel/Metode	Hasil
			deskriptif empiris, dimana metode deskriptif sendiri memiliki defenisi sebagai metode yang menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.	
5.	(Julimawati, 2015)  Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Kualitas Lingkungan Permukiman di Kecamatan Baleendah.	1. mengukur tingkat kualitas lingkungan permukiman; 2. mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan permukiman; 3. mengidentifikasi sejumlah faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan permukiman.	1. variabel - kondisi prasarana lingkungan - kondisi sarana permukiman - partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. - Sosial ekonomi masyarakat.  2. metode penelitian yang digunakan adalah metode partisipasi dalam menjaga kualitas lingkungan permukiman yang bersifat deskriptif analitik yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh antar variabel penelitian melalui pengujian hipotesis dengan uji statisitik.	Hasil penelitian menunjukkan kecenderungan bahwa kualitas lingkungan permukiman dapat dikatakan baik. Bentuk partisipasi dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang terdiri dari buah pikiran/ide, harta/uang, tenaga, keterampilan dan bentuk sosial. Factor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah pendapatan, ketersediaan sarana prasarana, persepsi tentang kualitas lingkungan permukiman, peran tokoh masyarakat, motivasi dan jumlah anggota keluarga sangat berpengaruh dalam menjaga kualitas lingkungan di kompleks permukiman.